



## Dinamika Hukum Administrasi Negara dalam Menanggulangi Tantangan Beban Administrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Quinny Azalia Putri<sup>1</sup>, Rizka Laelya Feliza<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Negeri Semarang

### Abstrak

Received: 08 Juni 2024

Revised: 15 Juni 2024

Accepted: 22 Juni 2024

*The development of science has made changes in various aspects of human life, including in the field of law. The social dynamics that occur in society also support this change. Therefore, Legal Science tries to adapt to these changes as time goes by. Law enforcement and government officials are no exception. The dynamics that occur in society give rise to reactions regarding how government officials handle these problems, including in terms of general administration, public services, security and other aspects of government. In the case mentioned previously, this can be called the Burden Administration. Specifically, this research will discuss how one of the relevant government officials will be focused on, namely the Semarang City Environmental Service, to contribute to solving various environmental problems in society, especially the Semarang City area. Next, the specific issue that will be raised is how the Semarang City Environmental Service handles the amount and intensity of waste which is the main problem in Semarang City. How waste has a big impact on the surrounding environment which of course makes people uncomfortable about this. This research uses a qualitative approach by collecting data based on observation and interview methods with related institutions, where this research was obtained directly from original sources, which in this case were obtained or collected from the field obtained from research or those concerned. The results of this research show that there is a burden on the administrative process in terms of public complaints to the relevant agencies, but this can be overcome by deploying directly to the relevant agencies and using the complaint application creation method created by the government concerned to make it easier for the people of Semarang city to submit related complaints.*

**Keywords:** Waste, Environment, Environmental Service, Administration, Complaints, Semarang

(\*) Corresponding Author: [quinnyazalia@students.unnes.ac.id](mailto:quinnyazalia@students.unnes.ac.id).

**How to Cite:** Putri, Q. A., & Feliza, R. L. (2024). Dinamika Hukum Administrasi Negara dalam Menanggulangi Tantangan Beban Administrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12574308>

## PENDAHULUAN

Dinamika sosial yang terjadi di masyarakat menimbulkan permasalahan-permasalahan yang mencuat dan perlu adanya penanganan segera. Tidak terkecuali dalam aspek lingkungan, dimana lingkungan ini mencakup tempat dimana manusia itu tinggal atau tempati. Menurut UU PPLH No. 32/2009, berbunyi 101: "lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu



sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Lingkungan yang ditinggali merupakan hal yang lumrah dimana manusia itu menghasilkan sampah baik yang berbentuk dapat terurai dan yang tidak dapat terurai. Semakin meningkat aktivitas manusia apalagi manusia tinggal berdampingan dan membentuk masyarakat, sampah yang dihasilkan semakin banyak, misalnya pada aktivitas pembangunan, perdagangan, industri. Lalu semakin menumpuknya sampah ,menimbulkan pertanyaan bagaimana masyarakat dan pemerintah yang terkait dapat menangani hal tersebut. Dikarenakan lama kelamaan dalam kehidupan sehari-hari sampah menjadi permasalahan sosial karena menimbulkan pencemaran. Pencemaran air, udara, dan tanah. Salah satunya adalah pencemaran air , banyak sampah yang lebih dipilih untuk dibuang ke sungai daripada ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir.Hal ini dikarenakan intensitas sampah lebih banyak daripada Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang tersedia. Permasalahan ini tidak luput juga terjadi di Kota Semarang. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kepala DLH Kota Semarang, Bambang Suranggono mengutip data dari Dinas Lingkungan Hidup, sebelum pandemi produksi sampah mencapai 1.437 ton per hari. Sedangkan, saat pandemi atau sekitar awal tahun 2020, sampah mengalami penurunan mencapai 900 ton per hari.Namun saat ini sampah yang diproduksi masyarakat Kota Semarang kembali meningkat. Rata-rata sampah yang dibuang ke TPA mencapai 1.110-1.150 ton per hari. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan intensitas sampah di Semarang. Hal ini juga menjadi perhatian masyarakat dikarenakan terdapat beberapa aspek yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat di Kota Semarang. Maka dari itu masyarakat mengajukan pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.Dimana hal tersebut menimbulkan permasalahan baru yaitu bagaimana penanganan pengaduan tersebut di dinas terkait.Yang dimana berdasarkan hal ini, ada kaitanya dengan beban administrasi yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Berdasarkan Latar Belakang tersebut penulis berniat untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengambilan data berdasarkan metode observasi dan wawancara ke Lembaga yang dimana lembaga tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber asli yang dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan yang didapat dari penelitian atau yang bersangkutan. Dimana melalui dialog langsung dengan aparat dinas terkait, peneliti dapat mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan persepsi responden dengan lebih rinci. Wawancara memungkinkan untuk memahami konteks dan kompleksitas suatu fenomena secara mendalam. Dengan menggunakan teknik wawancara juga memungkinkan peneliti memahami variabilitas individu dalam pengalaman dan perspektif yang dialami langsung oleh aparat yang bersangkutan. Disamping itu, peneliti juga menggunakan kajian literatur. tu tujuannya adalah mengetahui secara langsung tindakan dan upaya apa saja yang telah dilakukan dinas terkait dalam menangani masalah di tengah-tengah masyarakat khususnya di lingkungan Kota Semarang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Beban Administrasi dalam Hukum Administrasi Negara

Sebelum lebih lanjut membahas perihal mengenai Beban Administrasi dalam Hukum Administrasi Negara, terlebih dahulu peneliti membahas pengertian daripada Administrasi itu sendiri. Namun dalam hal ini, pembahasan mengenai beban administrasi tidak terdapat ujungnya. Dikarenakan administrasi berkaitan dengan aspek-aspek yang lain. Dalam hal ini contohnya tidak luput juga mempelajari tentang organisasi, manajemen, kepemimpinan, kebijakan, dan hubungan antar manusia. <sup>1</sup>Menurut pendapat para ahli yaitu Dimock & Dimock menyatakan bahwa administrasi adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki oleh masyarakat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya.

Pendapat lain mengatakan menurut Herbert Simon mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Dan dalam penggolongannya, terdapat 2 jenis administrasi yaitu Administrasi Negara dan juga Administrasi Niaga. Yang dimana penelitian ini menitikberatkan pada Administrasi Negara. Pelaksanaan Administrasi Negara adalah bertujuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat (Public service). Dan tentunya dalam hal ini juga dilakukan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah ditentukan. <sup>2</sup> Dalam hal ini, kaitannya dengan beban administrasi negara adalah mengenai kesulitan yang kita hadapi sebagai masyarakat dalam berurusan dengan negara membentuk persepsi mengenai pemerintahan. Karena berdampak pada kemampuan warga negara untuk mengakses layanan, beban-beban ini menjadi aspek penting namun jarang dipelajari dalam tata kelola pemerintahan. <sup>3</sup> Maka dari itu, itu mengapa dibahas lebih lanjut mengenai beban administrasi menumbuhkan pemahaman mengenai kita sebagai rakyat bukan hanya menjadi tanggung jawab, tetapi juga hak warga negara. Ini memungkinkan terciptanya masyarakat yang lebih terinformasi, partisipatif, dan memiliki peran aktif dalam pembangunan negara. Beban administrasi negara membahas dan membimbing pemahaman warga negara tentang hubungan mereka dengan negara, memediasi persepsi mereka tentang negara sebagai kekuatan positif atau negatif, dan mempengaruhi keterlibatan warga negara dalam kegiatan kewarganegaraan. Dalam hal lain, beban bersifat konsekuen. Beban-beban tersebut penting dalam menentukan apakah warga negara dapat memperoleh layanan yang mereka inginkan dan berhak mereka dapatkan. <sup>4</sup> Maka dari itu, dapat diberikan kesimpulan bahwa gambaran besar mengenai beban administrasi adalah bagaimana masyarakat dapat diberikan dan perlu dicatat bahwa

---

<sup>1</sup> DEFINISI ADMINISTRASI DALAM BERBAGAI SUDUT PANDANG, Lina Marliani, M.Si.

<sup>2</sup> DEFINISI ADMINISTRASI DALAM BERBAGAI SUDUT PANDANG, Lina Marliani, M.Si.

<sup>3</sup> Administrative Burden: Learning, Psychological, and Compliance Costs in Citizen-State Interactions Donald Moynihan,\* Pamela Herd,\* Hope Harvey†

<sup>4</sup> Administrative Burden: Learning, Psychological, and Compliance Costs in Citizen-State Interactions Donald Moynihan,\* Pamela Herd,\* Hope Harvey

beban administrasi bersifat konsekuen, dan pentingnya beban-beban tersebut mencuat dalam penilaian apakah warga negara dapat memperoleh layanan yang diinginkan dan sejatinya menjadi hak mereka.

2. Faktor penyebab Beban Administrasi dalam Hukum Administrasi Negara

Selanjutnya dibahas lebih lanjut bagaimana beban administrasi itu dapat terjadi di dalam ranah administrasi. Beban administrasi negara dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks apalagi dalam lingkup pembahasannya yang luas. Yang pertama yang peneliti adalah ketidakefisienan dalam sistem birokrasi, seperti proses pengambilan keputusan yang lambat, kelebihan aturan, dan duplikasi tugas, dapat meningkatkan beban administrasi negara. Hal ini berkaitan dengan learning coast dimana peraturan yang dibuat cenderung sulit untuk dicerna oleh masyarakat luas sehingga pendistribusian pemahaman mengenai peraturan tersebut sangatlah kecil. Dimana ini ada kaitannya dengan jumlah dan kompleksitas peraturan yang tinggi dapat meningkatkan beban administrasi negara, terutama jika prosedur penerapan dan pemantauan sulit dipahami atau memerlukan waktu yang lama. Maka dari itu, dengan tingginya jumlah kompleksitas dalam pemahaman peraturan yang diadakan oleh pemerintah, persyaratan yang diadakan pun akan semakin dipersulit sehingga cenderung sulit untuk digapai oleh masyarakat secara intensitas luas. Selanjutnya adalah mengenai ketersediaan dan kualitas teknologi informasi dalam sistem administrasi pemerintahan, yang mempengaruhi efisiensi dan beban administratif. Dibahas lebih lanjut, yaitu mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemerintah dapat mempengaruhi beban administrasi dengan memperhitungkan masukan dan kebutuhan masyarakat. Dapat dipahami bahwa faktor-faktor ini bersifat saling terkait dan dapat berinteraksi secara kompleks, sehingga perlu diadakannya pendekatan holistik dalam mengelola dan mengurangi beban administrasi negara. Mengenai hal tersebut, bentuk-bentuk dan dampak beban administrasi akan dibahas lebih lanjut di pembahasan berikutnya.

3. Bentuk dan dampak dari Beban Administrasi dalam Hukum Administrasi Negara

Terdapat tiga bentuk-bentuk serta dampak dari beban administrasi dalam Hukum Administrasi Negara yang pertama ada *Learning cost*, pengertian mengenai learning cost menurut (Moos & Azevedo 2009) adalah pengeluaran yang dilakukan pengguna dalam mempelajari dan beradaptasi dengan suatu sistem. Warga negara harus mempelajari tentang program ini, apakah mereka memenuhi syarat, sifat manfaatnya, dan bagaimana cara mengakses layanan.

Berdasarkan pengertian tersebut bisa kita simpulkan bahwa beban administrasi yang ditimbulkan dari adanya suatu kebijakan pemerintah cukup beragam contohnya mengenai pengetahuan masyarakat yang terbatas, sosialisasi dari dinas terkait yang belum mencakup segala elemen masyarakat serta banyak sekali informasi yang belum bisa masyarakat akses karna keterbatasan pengetahuan serta kurangnya minat masyarakat untuk mengetahui banyaknya program pemerintah. Yang kedua ada *Compliance cost* atau juga bisa disebut dengan kepatuhan syarat warga negara harus melengkapi aplikasi dan pendaftaran ulang, memberikan dokumentasi tentang status mereka, dan menghindari atau

menanggapi permintaan diskresi yang terdiri dari tiga aspek yaitu: direct money cost, time cost dan psychological cost yang harus masyarakat keluarkan saat melaporkan suatu kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Dari penjelasan tersebut bisa kita lihat bahwa ada berbagai pengeluaran juga syarat yang perlu dilakukan yaitu contohnya biaya transportasi, waktu dari masyarakat, serta kemudahan atau kesulitan yang dirasakan masyarakat saat melapor kepada dinas terkait. Yang ketiga ada *Psychological cost* meliputi kemudahan atau kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah. Warga negara menghadapi stigma karena berpartisipasi dalam program yang tidak populer, serta hilangnya otonomi dan meningkatnya stres yang timbul dari proses program. Contoh konkrit dalam *psychological cost* yang dialami masyarakat adalah labeling yang bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang, tanpa kita sadari dampak yang dirasakan masyarakat terhadap suatu kebijakan pemerintah bisa membuat masyarakat kehilangan kepercayaan diri, stress, serta bisa jadi dikucilkan masyarakat lainnya.<sup>5</sup>

#### 4. **Pengenalan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang**

Dinas lingkungan hidup adalah bagian dari unsur pelaksana yang menangani urusan dalam bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan persampahan dan air limbah bidang kehutanan. Dinas Lingkungan Hidup, dalam strukturnya dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan sebagai penanggung jawab di bawah naungan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mempunyai banyak program kerja diantaranya Car free day, program ini merupakan salah satu program gerakan yang digunakan untuk menurunkan ketergantungan masyarakat pada kendaraan bermotor. Gerakan ini dimulai dari kesadaran penduduk tidak hanya Semarang namun, dunia mengenai bahaya pemanasan global dan pentingnya pengurangan emisi bahan bakar di dunia. Seperti kita ketahui udara merupakan kebutuhan primer bagi manusia serta makhluk hidup lainnya di muka bumi ini. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dikatakan bahwa Udara sebagai sumber daya alam akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia beserta makhluk hidup lainnya sehingga harus dijaga serta dipelihara kelestariannya yang akan digunakan sebagai pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan dari makhluk hidup lainnya.

Supaya udara tetap dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pelestarian lingkungan hidup maka kita sebagai manusia wajib memeliharanya, menjaga serta menjamin mutunya dengan cara pengendalian pencemaran udara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui pencemaran udara yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang diantaranya dengan melakukan program hari bebas kendaraan ( Car Free Day) yang biasanya dilaksanakan di dua lokasi berbeda yakni di Jalan Pemuda dan Jalan Pahlawan.

---

<sup>5</sup> Donald Moynihan, et al (Administrative Burden: Learning, Psychological, and Compliance Costs in Citizen-State Interactions), 43-69.

Banyak manfaat dari pelaksanaan Car Free Day bagi masyarakat khususnya masyarakat Kota Semarang yakni sebagai sarana olah raga seperti jalan santai, berlari, bersepeda, senam, dan sepatu roda atau skate board. Dengan adanya pelaksanaan car free day jalanan menjadi luas yang dapat memudahkan para masyarakat melakukan olahraga secara nyaman tanpa takut akan kendaraan bermotor yang mengganggu.

Sebagai sarana rekreasi, saat car free day banyak masyarakat yang datang secara bersama-sama dengan teman atau keluarganya, sambil berolahraga ataupun berekreasi dengan melihat banyak event yang ada dalam acara car free day. Tidak hanya itu car free day juga digunakan sebagai ajang bersosialisasi sehingga masyarakat dapat merasa senang mempunyai sarana umum seperti alun-alun dengan adanya kegiatan car free day ini.

#### 5. Studi kasus penanganan masalah dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Studi kasus yang kami lakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mendapati bahwa permasalahan lingkungan utama di Kota Semarang adalah permasalahan mengenai pengelolaan sampah yang tidak kunjung usai karna banyaknya sampah yang dihasilkan masyarakat kota semarang tiap harinya. Sampah yang menjadi buangan biasa timbul dari aktivitas manusia serta hewan yang berupa padatan dan tidak dianggap memiliki guna atau tidak diinginkan lagi. Permasalahan sampah di kota besar umumnya pada peningkatan timbunan sampah yang terus bertambah tiap harinya tanpa adanya pengelolaan serta tidak adanya sistem manajemen sampah yang baik. Kesadaran masyarakat yang kurang mengenai sampah juga menambah permasalahan sampah. Kurangnya minat masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah di kota semarang mengakibatkan persoalan lingkungan baru di kota ini. Peningkatan jumlah sampah tiap harinya sebaiknya harus dikelola dengan cara yang efektif untuk mengurangi timbunan sampah yang ada di TPA.

Kondisi sampah harusnya menjadi perhatian khusus bagi dinas terkait. Fasilitas seperti TPS dan TPA yang kian hari semakin sedikit membuat sampah membludak terlebih lagi jumlahnya yang tidak sebanding dengan jumlah penduduknya menyebabkan timbulkan penumpukan serta bau yang tidak sedap yang ditimbulkan dari keberadaan TPS dan TPA di kota semarang ini, selain itu permasalahan sampah juga mengakibatkan menurunnya estetika dari kota semarang itu sendiri.

Pengelolaan sampah pada kota semarang masih sangat kecil, dinas terkait yang menangani permasalahan sampah ini sedang melakukan berbagai upaya melalui program-program yang mereka buat demi mengelola sumber daya yang masih memiliki nilai ekonomis dengan sistem pengelolaan sampah terpadu di beberapa titik di kota semarang.

Dalam undang-undang No.18 Tahun 2008 mengenai persoalan sampah disebutkan bahwa tiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan yang semakin parah, maka dari itu perlu adanya upaya penanganan sampah dengan baik yang berwawasan lingkungan. Ada beberapa langkah antisipasi mengenai permasalahan sampah yang telah dilakukan

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yaitu pemisahan sampah organik dan anorganik pada lingkungan masyarakat, pembuatan TPA baru di Semarang serta sosialisasi ke masyarakat dan bahayanya bagi lingkungan.

6. Beban administrasi dalam penanganan studi kasus dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Beban administrasi yang timbul dari permasalahan sampah di kota Semarang cukup beragam mulai dari masyarakat yang dipersulit penanganannya dengan banyaknya prosedur yang harus dilakukan saat melapor ke dinas terkait, waktu penanganan laporan setelah diajukan yang tergolong cukup lama, serta tindakan yang hanya berupa himbauan.

Prosedur yang harus masyarakat jalani saat ingin mengajukan aduan terkesan cukup rumit dan membuat masyarakat menjadi terbebani, yakni masyarakat harus datang ke kantor untuk mengisi formulir aduan lalu menghadiri penanganan aduan lingkungan atau melaporkannya ke aplikasi lapor sampah yang digagas dan dikembangkan oleh dinas lingkungan hidup kota Semarang namun, faktanya banyak masyarakat yang masih kebingungan dan tidak tahu mengenai aplikasi ini karna kurang sosialisasi dari dinas terkait termasuk kami yang baru tau mengenai aplikasi ini saat melakukan observasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Aplikasi ini hanya bisa di download melalui Play Store hal ini mengurangi minat masyarakat untuk melapor aduannya.

Waktu penanganan paling cepat dari dinas terkait mengenai laporan masyarakat memakan waktu hingga 3 bulan itupun bisa lebih dari waktu yang sudah ditentukan tergantung berapa banyak laporan yang masuk. Waktu ini bisa dibilang cukup lama mengingat masalah sampah bukan permasalahan yang cepat penanganannya juga harus diadakan survei langsung ke lokasi supaya dinas terkait bisa mendapat solusi yang paling efektif untuk menangani aduan dari masyarakat yang melapor.

Sejauh ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang hanya melakukan himbauan kepada laporan masyarakat yang masuk dan jarang sekali ada tindakan untuk membubarkan atau tindakan lain dalam menangani laporan dari masyarakat. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat pasalnya dengan waktu yang cukup lama mereka hanya mendapat himbauan dan tidak ada langkah lain dalam usaha penanganan permasalahan terlapor.

7. Upaya pengurangan dan perbaikan Beban Administrasi dalam penanganan studi kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi serta memperbaiki beban administrasi dalam penanganan studi kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

1. Identifikasi proses administrasi

Seiring dengan perkembangan zaman kita dapat menggunakan perangkat lunak atau sistem manajemen informasi yang dapat membantu tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sehingga mengurangi beban kerja manual.

2. Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja  
Memberikan pelatihan kepada staf untuk meningkatkan keahlian mereka dalam menggunakan teknologi dan sistem baru, serta memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang digunakan untuk menggunakan perangkat lunak baru dan memanfaatkan teknologi.
3. Implementasi sistem manajemen dokumen  
Menggunakan sistem manajemen dokumen untuk mengelola dan menyimpan dokumen dengan efisien sehingga mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari dan mengelola dokumen manual.
4. Pembaruan kebijakan dan prosedur  
Perlu adanya tinjauan kebijakan dan prosedur yang ada untuk memastikan keefektifan dan relevansinya agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan.
5. Peningkatan komunikasi internal  
Pentingnya adanya komunikasi yang efektif antar bagian dalam organisasi supaya mempermudah pertukaran informasi dan meningkatkan koordinasi antar tim
6. Pemantauan kinerja dan evaluasi rutin  
Melakukan metrik kinerja untuk memantau sejauh mana tujuan pengurangan beban administrasi tercapai
7. Partisipasi masyarakat  
Harus banyak melibatkan masyarakat dalam pengumpulan data dan pelaporan untuk mengurangi beban administrasi yang harus ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui platform online
8. Pemantapan koordinasi Antarinstansi:  
Tingkatkan koordinasi dengan instansi lain yang terlibat dalam pekerjaan lingkungan hidup untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan efisiensi pemanfaatan sumber daya

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dapat mengurangi beban administrasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan fokus pada tujuan utama mereka dalam pelestarian lingkungan hidup.

## **KESIMPULAN**

Dinamika sosial dalam masyarakat, khususnya terkait dengan lingkungan, menimbulkan permasalahan yang memerlukan penanganan segera. Fokus utama dalam hal ini adalah pada permasalahan sampah di Kota Semarang, yang mencakup peningkatan produksi sampah, pencemaran air, udara, dan tanah. Meskipun ada penurunan produksi sampah selama pandemi, namun kini intensitas sampah kembali meningkat.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menjadi lembaga yang terlibat dalam menangani permasalahan lingkungan. Namun, dalam hal ini kami lebih banyak menyoroti beban administrasi yang dihadapi oleh dinas tersebut, terutama terkait dengan penanganan pengaduan masyarakat. Masyarakat mengajukan

pengaduan terkait sampah, namun prosedur yang rumit, waktu penanganan yang lama, dan kurangnya tindakan nyata dari dinas membuat beban administrasi menjadi masalah yang perlu diatasi.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan observasi dan wawancara ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Hasil penelitian menggambarkan bahwa beban administrasi dalam konteks penanganan sampah dapat berupa learning cost, compliance cost, dan psychological cost. Artinya, masyarakat harus belajar dan beradaptasi dengan sistem penanganan sampah, mematuhi syarat-syarat yang diberlakukan, dan menghadapi dampak psikologis seperti stigma dan kehilangan otonomi.

Dalam studi kasus tentang penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, terlihat bahwa beban administrasi mencuat dalam proses pelaporan dan penanganan aduan masyarakat. Waktu penanganan yang lama dan tindakan yang terbatas membuat masyarakat merasa terbebani. Namun, dinas tersebut melakukan upaya seperti pemisahan sampah, pembuatan Tempat Pembuangan Sampah (TPA) baru, dan sosialisasi ke masyarakat.

Untuk mengurangi beban administrasi, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan seperti identifikasi proses administrasi, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, implementasi sistem manajemen dokumen, pembaruan kebijakan, peningkatan komunikasi internal, pemantauan kinerja rutin, partisipasi masyarakat, dan pemantapan koordinasi antarinstansi.

Dengan demikian, hal ini mencerminkan perlunya perhatian terhadap beban administrasi dalam penanganan permasalahan lingkungan, khususnya terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Semarang, dan menekankan pentingnya upaya untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas dinas terkait.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- DEFINISI ADMINISTRASI DALAM BERBAGAI SUDUT PANDANG, Lina Marliani, M.Si. Link : <file:///C:/Users/USER/Downloads/1743-6306-1-PB.pdf>
- Administrative Burden: Learning, Psychological, and Compliance Costs in Citizen-State Interactions Donald Moynihan,\* Pamela Herd,\* Hope Harvey† Link : <https://academic.oup.com/jpart/article/25/1/43/885957>